

1 Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris

I Dewa Gede Prastha Pratama Putra¹⁾, Suksma Susanti²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: dewede1410@yahoo.co.id¹⁾, suksma.susanti@gmail.com²⁾, ratihkumaladewi@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This research analyzes how the UK's policy plan decides on Immigrant Policy after the Brexit Referendum in 2016. The UK's decision plan will be analyzed using Immigrant Theory, Regionalism and Foreign Policy. This discussion aims to see a picture of how immigrants policy plans are after the UK decides to leave the European Union through the referendum. Immigrant theory is used to analyze problems caused by the presence of immigrants in a country. Regionalism concept is used to observe European Union organizations in a skeptical perspective that caused UK's renounce their membership in the European Union. Foreign Policy Concept is used to explain that the Immigrant Uni Eropa has become the motivation for the UK to leave European Union through Brexit Referendum. The final result of the UK's plans to adopt Australian policy on conducting selection to the entry of EU and non-EU immigrants.

Keywords: Brexit, Immigrant, Europe Union, United Kingdom.

1. PENDAHULUAN

Britania Raya adalah sebuah negara kesatuan yang diatur dibawah monarkhi konstitusional dan system parlemen. Lalu terdapat empat negara dalam kedaulatan Britania Raya yang dimana masing-masing negaranya telah bersatu sendiri yakni Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. Awal Inggris bergabung dengan Uni Eropa yaitu pada saat krisis minyak yang terjadi di tahun 1973 dimana yang menyebabkan perlambatan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara Inggris. Bertepatan dengan hal tersebut, Inggris kemudian mulai melihat peluang keanggotaan di Uni Eropa sangat besar. Pada diawal pembentukan Uni Eropa, Inggris sudah melihat adanya perbedaan yang cukup jauh antara Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita negara yang sudah tergabung di dalam Uni Eropa dengan pertumbuhan PNB inilah Inggris yang kemudian menjadi alasan Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Dihaarapkan dengan Inggris gabung

dengan Uni Eropa dapat mengubah atau mengembangkan keadaan perekonomian Inggris pada saat itu. Inggris kemudian telah resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1973.

Inggris merupakan negara salah satu kontributor besar terhadap pertumbuhan Uni Eropa terutama dalam bidang pendanaan di Uni Eropa. Inggris juga merupakan penyumbang iuran terbesar nomor tiga setelah negara Jerman dan Perancis. Total dana terkumpulnya yaitu 145 milyar Euro (2.168 triliun rupiah) di tahun 2015, itu artinya iuran 12,57% yang dibayarkan oleh Inggris tahun lalu adalah 18,2 milyar Euro (272 triliun rupiah). Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa bukan tanpa alasan, Inggris tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar terkait dengan keanggotaannya di Uni Eropa. Inggris tentu akan mendapatkan kemudahan dalam perdagangan internasional yaitu tidak ada hambatan tarif maupun hambatan non tarif untuk perdagangan dalam Uni Eropa (Sari, 2016)

Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa menyebabkan Inggris mempunyai kewajiban yang harus tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi Uni Eropa. Salah satu kebijakan Uni Eropa yang harus diikuti oleh Inggris adalah kebijakan “*Open Door Immigration Policy*” pada tahun 1973 dimana kebijakan tersebut mewajibkan Inggris membuka lebar keamanan perbatasannya kepada para imigran sehingga para imigran dapat dengan bebas masuk dan menetap di negaranya. Walaupun kebijakan tersebut didasari oleh alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan bersama di dalam organisasi Uni Eropa, namun hal ini malah membuat Inggris kehilangan kontrol terhadap perbatasannya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan arus imigran yang cukup signifikan memasuki wilayah negara tersebut.

Dengan adanya Kebijakan tersebut lalu Inggris akan melaksanakan referendum dimana Referendum yang dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 ini dilakukan secara serentak di keempat wilayah negara anggota Britania Raya, yaitu Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara yang dipimpin pelaksanaannya oleh mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Cameron pun sebenarnya lebih memilih untuk tetap tergabung di Uni Eropa yang sudah direformasi daripada keputusan untuk keluar dari Uni Eropa. Referendum yg dilakukan oleh pemerintah kepada sekitar 30 juta konstitusi Uni Eropa n Britania Raya dengan partisipasi suara mencapai 72,2% diperoleh hasil yaitu sekitar 51,9 % suara memilih untuk keluar, sementara 48,2% lainnya memilih untuk bertahan di Uni Eropa. Dengan kemenangan perolehan suara leave melalui referendum, maka dengan demikian diputuskan bahwa Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa (BBC, 2016).

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Literatur yang dijadikan bahan dalam mendukung penelitian ini. Literatur yang pertama penulis gunakan adalah tulisan dari Abderrahim Haddou “*Morocco and Their Decision to Withdraw from the African Union*”. Tulisan ini memaparkan bagaimana morocco keluar dari Organisasi Uni Afrika. Peseteruan yg terjadi pada daerah Sahara Barat sebagai penyebab munculnya Maroko berdasarkan keanggotaan OAU. Permasalahan panjang ini berawal dari munculnya Perancis sebagai negara penjajah berdasarkan Sahara Barat. Maroko merasa bahwa wilayah bekas jajahan Perancis ini adalah bagian menurut negaranya. Namun, gerombolan Polisario yang dipimpin oleh Sahrawi jua ingin mendirikan negara yg merdeka pada daerah tersebut.

Kajian pustaka yang kedua berjudul *Morocco and the African Union Prospects for Re-engagement and Progress on the Westerns Sahara* yang ditulis oleh Terence McNamee, Greg Mills and J Peter Pham (2013). Dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana Maroko itu sendiri berada di Uni Afrika. Yang membedakan bahwa tulisan ini lebih fokus menjelaskan bagaimana kondisi Maroko pada keanggotaan Uni Afrika dan kondisi Maroko setelah keluar dari Uni Afrika. Maroko dapat secara penuh melakukan tindakan reformasi demokrasi negaranya sendiri seperti membenahi kebijakan, serta memperbaharui infrastruktur seperti membangun kereta swasembada energi hanya 16% termasuk produksi energi nuklir tahun 2003.

Kajian pustaka yang ketiga berjudul *Isu Pengungsi Global dan Kebijakan Australia* yang ditulis oleh Adirini Pujayantii (2015). Dalam tulisan ini membahas tentang Penyeludupan Imigran Gelap oleh Australia menuju Indonesia. Dalam penelitian yang ditulis oleh Adirini Pujayanti telah memberikan kontribusi terhadap penulis untuk mengerti bahwa terdapat mekanisme yang harus ditaati oleh suatu

negara untuk menerima imigran yang berasal dari luar negeri. Mekanisme tersebut berupa konvensi, perjanjian maupun kebijakan yang berasal dari organisasi internasional atau regional, yang bersifat mengharuskan negara tersebut untuk mentaati ketentuan tersebut. Seperti dalam kasus Pujayanti (2015) ini, disebutkan bahwa Australia telah meratifikasi konvensi pengungsi 1951, dimana Australia mengetahui prinsip untuk tidak memulangkan pengungsi. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan tersebut Australia seharusnya menerima pengungsi yang diseludupkan ke Indonesia. Begitu juga dalam kasus penulis, Inggris ketika masih menjadi anggota Uni Eropa harus menyetujui dan menjalankan kebijakan Uni Eropa untuk menerima Imigran dari Uni Eropa

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak referendum *Brexit* terhadap kebijakan imigran Uni Eropa di Inggris melalui konsep yang dijabarkan di atas melalui interpretasi data data atau informasi yang diperoleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur, berita, jurnal, artikel, laporan, situs resmi terkait isu penelitian. Teknik penyajian data yang digunakan yaitu penyusunan sekumpulan data yang telah didapatkan dan direduksi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 2012). Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks atau narasi, grafik serta tabel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inggris menganggap persoalan imigran merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Adapun

permasalahan imigran yang dihadapi Inggris disebabkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa yaitu Open Door Immigration Policy. Kebijakan Open Door Immigration Policy ini membuat Inggris harus membuka keamanan perbatasannya terhadap imigran. Sehingga membuat Inggris sulit untuk mengontrol Imigran yang masuk ke negaranya. Kebijakan free movement of persons atau dikenal dengan Open Door Immigration Policy yang berlaku saat ini dimuat dalam TFEU (The Treaty on the Functioning of the European Union) Lisbon Treaty (2009) dan EEA Agreement. Kebijakan free movement of persons menjamin konsep kewarganegaraan Uni Eropa, yaitu adanya hak warga negara anggota untuk bergerak atau berpindah dan bebas berada di dalam wilayah negara anggota, karena setiap pemegang kewarganegaraan dari salah satu negara anggota Uni Eropa secara otomatis juga menjadi warga negara Uni Eropa. Hal ini menyebabkan kian bertambahnya imigran dari negara anggota Uni Eropa datang ke UK.

Sebenarnya imigran merupakan faktor penting dalam sektor ekonomi dan fiskal di Inggris. Terdapat regulasi yang dimiliki Inggris bahwa imigran wajib membayar pajak secara khusus. Tahun 2011 Inggris mendapatkan pemasukan 20 Miliar poundsterling keuangan dari imigran Uni Eropa. Uni Eropa migran menyumbang 64% pajak negara Inggris. Begitupula pemasukan yang didapat Imigran yang berasal dari Negara Non Uni Eropa telah memberikan kontribusi sekitar 5 miliar pound untuk keuangan Inggris dalam periode yang sama. Namun keuntungan ini tidak sepadan dengan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat lokal Inggris. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam beberapa aspek akibat dari banyaknya jumlah imigran. Permasalahan tersebut antara lain dari masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah perumahan, dan masalah mengenai Layanan Kesehatan Nasional.

Dalam masalah ekonomi Inggris beranggapan bahwa pemasukan yang didapat dari pajak imigran tidak sejalan dengan keuntungan yang diharapkan masyarakat lokal Inggris. Sederhananya, keuntungan dari pemasukan pajak imigran tersebut tidak dapat menutup kerugian yang dirasakan oleh rakyat Inggris. Dengan datangnya migran ke negara Inggris ini, maka hal tersebut akan mengancam keberlangsungan kehidupan rakyat Inggris. Meskipun Inggris merupakan negara modern dengan industrial terbesar di Eropa, jumlah lapangan pekerjaan pun akan semakin menyempit manakala migran datang ke negara tersebut. Migran yang datang ke negara Inggris berasal dari berbagai belahan negara di dunia. Imigran ini menjadi salah satu faktor alasan suara terkuat bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa dengan alasan jumlah mereka yang sangat banyak, utamanya dari negara-negara Eropa timur yang menjadi anggota Uni Eropa (Michael, 2016).

Selain dari sektor pekerjaan, Inggris juga melihat bahwa permasalahan yang disebabkan oleh banyaknya jumlah imigran berdampak pada sektor keamanan domestik mereka. Tindakan kekerasan ini yang muncul contohnya seperti pemukulan, pencabulan, penusukan, bahkan pembunuhan menjadi marak semenjak bertambahnya jumlah imigran. Menurut media populer di Inggris yaitu salah satunya The Sun melalui Freedom of Information, menyatakan bahwa dalam rentan waktu tahun 2015-2016 hampir 900 orang migran telah melakukan tindakan kriminal. Tindakan yang dilakukan tersebut seperti pencabulan, ancaman pembunuhan, hingga kekerasan terhadap usia bawah umur (Hamilton, 2016). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminalitas oleh para migran di Inggris yaitu adanya kesulitan para migran untuk berbaur dan juga sulit nyaman dapatkan pekerjaan tetap.

Selanjutnya Masalah perumahan juga menjadi salah satu dampak dari migrasi. Pembangunan rumah di Inggris telah tertinggal selama 35 tahun. Pemerintah Inggris tengah kesulitan memberikan akomodasi layak bagi para imigran, baik legal maupun ilegal. Meskipun meningkat secara bertahap dalam penyelesaian selama dua tahun terakhir, Inggris masih tetap mengalami kekurangan perumahan dan menjadi lebih akut setiap tahunnya. Melonjaknya imigran di Inggris di sisi lain mampu membuat kota atau negara tujuannya lebih kumuh karena mereka tidak memiliki cukup modal untuk hidup layak. Para penyewa rumah, pemilik kontrakan, atau landlord mengenakan biaya sewa yang begitu tinggi bagi imigran gelap. Hal inilah yang memicu adanya rumah-rumah “gelap” di Inggris. Penghuni gubukgubuk semacam ini menggembung sejak awal tahun 2013. Rumah tersebut berlantai beton dengan kondisi sebagian atapnya yang belum rampung. Beberapa dinding rumah itu pun terbuka dan harus ditutup dengan seprai. Rumah tersebut penuh dengan kasur-kasur kotor (Kompas, 2013).

Selain dari permasalahan Ekonomi, keamanan dan perumahan, terdapat juga permasalahan publik, Hal ini terkait dengan kebijakan publik mengenai Layanan Kesehatan Nasional atau National Health Security (NHS) dan pelayanan pendidikan. Penyediaan pelayanan publik dinilai tidak cukup mampu menanganinya dan terlalu lambat untuk merespon meningkatnya permintaan masyarakat. Melonjaknya imigran membuat alokasi dana untuk pembiayaan publik meningkat. Beban penghematan telah jatuh akibat pemotongan kesejahteraan dan belanja sosial lainnya. Hal ini terus berkembang setiap tahunnya. Manfaat pajak dari aliran imigrasi ke pemerintah pusat yang lambat dalam mengimbangi organisasi seperti NHS atau otoritas pendidikan setempat membuat tambahan untuk biaya penyediaan pelayanan publik yang diperlukan oleh imigran (Ipsos Mori 2017)

Perilaku pengungsi imigran yang keras dan cenderung melakukan tindakan kriminal, ditambah lagi dengan biaya dan pengorbanan lebih besar untuk imigran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Inggris membuat sebagian elit politik dan rakyat Inggris harus mengambil langkah tegas dengan mengadakan referendum. Dalam referendum yang diselenggarakan kali ini ada dua kubu kampanye yang saling berhadapan yaitu Brexit dan Remain. Brexit merupakan kependekan dari Britain Exit yaitu suatu istilah yang dipopulerkan oleh media massa dan pada akhirnya menjadi hashtag populer di kalangan yang mendorong Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Sebaliknya kelompok yang pro dengan Uni Eropa mempunyai slogan Remain, atau Britain remain. Keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa merupakan salah satu isu penting yang terdapat di Uni Eropa. Ide untuk melaksanakan referendum ini dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri David Cameron, sebagai bagian dari wacana dalam kampanyenya menuju kursi PM Inggris untuk kedua kalinya.

Terkait dengan upaya keluar dari Uni Eropa, Inggris diharuskan untuk mengajukan Article 50 dari Perjanjian Lisbon yang memberikan kedua belah pihak dua tahun untuk menyetujui persyaratan atas perpecahan tersebut. Article 50 adalah merupakan sebuah planning buat negara manapun yang ingin keluar dari Uni Eropa. Article 50 dibuat sebagai bagian berdasarkan Perjanjian Lisbon yang merupakan sebuah konvensi yang ditandatangani oleh semua negara Uni Eropa yang menjadi sebuah hukum di tahun 2009. Sebelum adanya perjanjian tersebut, tidak ada mekanisme formal untuk sebuah negara untuk meninggalkan Uni Eropa. Theresa May memiicu proses ini pada tanggal 29 Maret, yang berarti Inggris dijadwalkan untuk keluar dari keanggotaan pada hari Jumat, 29 Maret 2019.

Pada tanggal 23 Juni 2016, Referendum keanggotaan Uni Eropa Inggris berlangsung di Inggris dan Gibraltar. Keanggotaan Uni Eropa telah menjadi topik perdebatan di Inggris sejak negara tersebut bergabung dengan European Communities (The Common Market), seperti yang diketahui kemudian, pada tahun 1973. Referendum dilakukan secara sangat berbeda dengan referendum keanggotaan Masyarakat Eropa pada tahun 1975 dengan prosedur penghitungan yang lebih terlokalisasi dan regionalis dan juga diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum, badan publik yang tidak ada pada saat pemungutan suara pertama.

Penghitungan dimulai segera setelah pemungutan suara ditutup pada 23 Juni dari 22:00 BST dan seterusnya sehingga menjadikan referendum Inggris pertama yang dihitung semalam dan membutuhkan waktu sembilan jam dan dua puluh menit untuk diselesaikan. Hasil referendum diramalkan oleh BBC sesaat sebelum pukul 04:40 BST (sekitar 6 jam 40 menit setelah pemungutan suara ditutup), dengan sekitar 308 hasil dinyatakan pada saat itu. Hasil pertama yang diumumkan adalah Gibraltar, dan yang terakhir adalah Cornwall.

Adapun hasil akhir referendum untuk Inggris dan Gibraltar diumumkan di Manchester Town Hall pada 07:20 BST pada hari Jumat 24 Juni 2016 setelah semua 382 wilayah pemilihan dan dua belas wilayah Inggris telah mengumumkan hasilnya oleh Chief counting officer untuk referendum, Jenny Watson. Dalam sebuah referendum di Inggris, posisi Chief counting officer dipegang oleh ketua Komisi Pemilihan Umum. Dengan jumlah pemilih nasional sebesar 72%, terhitung 25.359 suara yang tidak valid, jadi 38% suara tidak masuk. Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, dengan 51,9% terhitung 17jt suara untuk 'Leave', dan 48,1% terhitung 16jt suara untuk 'Remain' dengan 263 (68,84%), wilayah suara yg memilih untuk

"Meninggalkan Uni Eropa " ke 119 (31,15%) wilayah suara yang memilih untuk "Bertahan menjadi anggota Uni Eropa (UK, 2016).

Setelah dilaksanakan referendum pada 24 Juni 2016, David Cameron pun akhirnya mengundurkan diri pada Oktober 2016 karena ia kalah dalam referendum ini. Pengunduran diri yang dilakukan oleh David Cameron dilatarbelakangi alasan bahwa ia tidak ingin menjadi distraksi dalam isu tersebut. Posisi Cameron akhirnya digantikan oleh Theresa May yang akan terus melanjutkan hasil dari referendum ini untuk keluar dari organisasi Uni Eropa.

Salah satu penyebab terkuat dari para pendukung Brexit adalah kasus imigran. Dengan bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa, pintu masuk bagi para imigran terbuka lebar, terutama imigran dari sesama Negara Eropa, yakni Kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Alasan Inggris sebagai tujuan favorite para migran untuk mencari pekerjaan: pertama, ekonomi di Inggris relatif lebih baik dibandingkan dengan negara lain di Kawasan Eropa, kedua, sistem jaminan sosialnya yang baik; ketiga, syarat teknik bahasa.

Meskipun Inggris sudah menyatakan diri untuk meninggalkan Uni Eropa, namun Inggris belum bisa dikatakan telah resmi keluar. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan mengenai proses keluarnya anggota Uni Eropa yang diatur dalam Lisbon Treaty (Traktat Lisbon). Berdasarkan Pasal 50 Traktat Lisbon disebutkan bahwa bila suatu negara ingin mengundurkan diri dari keanggotaannya, maka wajib bagi mereka untuk memberikan notifikasi kepada Dewan Uni Eropa dalam kurun waktu dua tahun, agar dapat melakukan negosiasi dengan dewan dan menetapkan syarat atas penarikan dirinya. Setelah dua tahun waktu untuk negosiasi tersebut berakhir, hak dan kewajiban UK sebagai anggota Uni Eropa

berakhir. Jadi Inggris akan resmi keluar pada tahun 2019.

Upaya keluarnya Inggris dari Uni Eropa melalui referendum dapat memberikan kewenangan Inggris untuk membuat kebijakan imigrasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Derasnya arus imigrasi dari negara-negara konflik Timur-Tengah dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara Eropa. Inggris dapat terbebas dari beban arus imigrasi dengan kebijakan kontrol perbatasan yang ketat, ataupun menerapkan syarat masuknya imigran dengan ketrampilan yang dibutuhkan perekonomian UK.

Inggris pada akhirnya merumuskan beberapa kebijakan terkait persoalan ini. Adapun diantaranya adalah dengan Kebijakan Open Door Immigration Policy atau yang biasa juga disebut Free Movement of Person yang diterapkan oleh Uni Eropa menimbulkan keresahan tersendiri bagi warga Inggris. Masyarakat Inggris memiliki pandangan tersendiri terkait dengan kebijakan tersebut. Masyarakat Inggris mempunyai berpandangan bahwa dengan adanya peningkatan arus imigran yang tinggi akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan dan ekonomi dalam negeri Inggris. Hal ini dapat dikatakan menjadi ancaman terhadap keamanan sosial dan ekonomi berdasarkan warga penerima (Dewi and Sudagung, 2017). Meskipun Inggris adalah sebuah negara dengan perindustriaan moder terbesar di Eropa, masuknya tenaga kerja yang berasal dari kalangan imigran dapat menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat Inggris sendiri.

Sebenarnya tujuan dari kebijakan free movement of persons atau Open Door Immigration policy adalah untuk meningkatkan perekonomian negara-negara Eropa melalui mobilisasi tenaga kerja. Perekonomian Inggris yang mulai meningkat pesat

membuat Inggris merasa diuntungkan dengan kebijakan ini karena kebijakan ini dianggap akan mempermudah Inggris untuk mendapatkan banyak tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan Inggris mengalami laju pertumbuhan tenaga kerja yang cukup signifikan. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan arus imigrasi yang efisien, perlakuan adil terhadap imigran dari warga negara ketiga (warga negara non Uni Eropa) yang tinggal secara legal di negara anggota, serta meningkatkan langkah-langkah untuk memerangi imigrasi ilegal dan perdagangan manusia (Fransisca dkk, 2017).

Namun kebijakan ini mengakibatkan terbatasnya hak negara anggota dalam mengontrol arus imigran yang masuk ke wilayahnya. Arus imigran yang tinggi dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai ekonomi dan budaya, dimana hal ini akan memicu ketegangan antar masyarakat lokal dengan penduduk imigran yang cenderung berujung pada tindak kekerasan terhadap imigran. Tindak kekerasan yang muncul seperti penusukan, pelecehan, pembunuhan, bahkan menaniaya dibawah umur menjadi marak terjadi semenjak bertambahnya jumlah imigran. Kebijakan Uni Eropa dalam mengatasi masuknya imigran dan penjagaan keamanan di perbatasan menjadi diragukan semenjak maraknya aksi terorisme. Adanya serangan teror yang terjadi di Paris pada 13 November 2015 dan di Brussels, Belgia, pada Selasa 22 Maret 2016 yang dilakukan oleh kelompok ISIS merupakan salah satu bentuk lemahnya sistem keamanan di Uni Eropa (News, 2016). Selain dampak di bidang keamanan, persoalan di bidang ekonomi juga menjadi dampak dari arus imigran yang tinggi dimana upah pekerja di Inggris menurun antara tahun 2008 sampai 2014. Salah satu faktor pendorongnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara migran dan menurunnya upah. Masalah perumahan juga

menjadi salah satu dampak dari migrasi. Pembangunan rumah di Inggris telah tertinggal selama 35 tahun. Meskipun meningkat secara bertahap dalam penyelesaian selama dua tahun terakhir, Inggris masih tetap mengalami 54 kekurangan perumahan dan menjadi lebih akut setiap tahunnya. Inggris sekarang memiliki ruang hidup terendah per penduduk dan rumah baru terkecil di Uni Eropa. Masalah lainnya adalah kebijakan publik mengenai Layanan Kesehatan Nasional atau National Health Security (NHS) dan pelayanan pendidikan. Penyediaan pelayanan publik terlalu lambat untuk merespon meningkatnya permintaan untuk masyarakat. Manfaat pajak dari aliran imigrasi ke pemerintah pusat yang lambat dalam mengimbangi organisasi seperti NHS atau otoritas pendidikan setempat membuat tambahan untuk biaya penyediaan pelayanan publik yang diperlukan oleh imigran.

Pada akhirnya, pasca terjadinya referendum pemerintahan Inggris dibawah Theresa May mengemukakan beberapa rancangan kebijakan yang nantinya akan segera dikaji terkait perumusannya. Theresa May sendiri menyetujui konsensus masyarakat negaranya untuk segera melepaskan diri dari keanggotaan Uni Eropa.

Adapun kebijakan yang dimaksud, Inggris tidak akan mengizinkan pergerakan bebas untuk tetap seperti sekarang. Semua hak imigran untuk datang, tinggal, dan bekerja di Inggris tidak akan diberikan akses kebebasan seperti sebelumnya. Akan dilakukan seleksi terhadap para imigran dan memastikan semua imigran yang masuk ke Inggris harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Pemerintah Inggris telah mengeluarkan sejumlah pernyataan sejak referendum mengenai opsi yang memungkinkan. Misalnya, David Davis, Menteri Brexit, menyarankan bahwa mungkin ada batas waktu yang diberlakukan pada migran Uni Eropa, setelah itu mereka tidak akan diizinkan

untuk tetap tinggal di Inggris pasca-Brexit. Dia juga mengindikasikan bahwa Inggris tidak akan sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara Uni Eropa tanpa timbal balik bagi warga negara Inggris. Meskipun ada beberapa indikasi bahwa beberapa Negara Anggota Uni Eropa mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan Inggris membatasi migrasi selama beberapa tahun tertentu (Christiastuti, 2016).

Theresa May dan beberapa menteri kabinet, antara lain Boris Johnson, Michael Gove, dan Priti Patel mengatakan bahwa Inggris akan mengadopsi kebijakan yang serupa dengan kebijakan pemerintah Australia tentang imigran dan pencari suaka. Terkait proses pembuatan kebijakan dapat dilihat bahwa Inggris belum memiliki kebijakan final mengenai posisi mereka dalam mengatasi permasalahan imigran di negaranya. Namun terdapat beberapa pernyataan dari pemerintah Inggris yang dinyatakan oleh Theresa May terkait gambaran arah kebijakan Inggris yang sedikit banyaknya akan mengadaptasi kebijakan dari negara lain yang dirasa sudah efektif.

Inggris pada prosesnya berencana untuk mengadaptasi kebijakan Australia terkait penerimaan imigran dengan memberlakukan kebijakan 2 steps immigration yaitu short term visa dan permanent resident (Government, 2019), dimana dalam pengajuan permanent resident terdapat beberapa persyaratan yaitu: 1. *Skill Assessment*. Pemohon *permanent resident* (PR) diwajibkan untuk mengikuti *skill assessment* untuk mengetahui skill yang dimiliki dan apakah pekerjaan pemohon termasuk di dalam daftar *Skill Occupation List* (SOL). 2. *Graduate Temporary Visa*. Apabila pemohon sudah menyelesaikan dua tahun masa studi dengan mengambil jurusan yg termasuk di dalam daftar SOL atau sudah menyelesaikan program Bachelor di Australia dan juga sudah memiliki skor IELTS minimal 7.0,

maka pemohon berhak untuk mengajukan *Graduate Temporary Visa* (GTV). Melalui GTV ini pemohon akan diberikan waktu tambahan selama 18 bulan untuk tinggal di Australia sehingga pemohon memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan bersponsor dari pemberi kerja atau negara bagian. 3. Kemampuan Bahasa Inggris. Seorang pemohon PR visa diwajibkan untuk memiliki kompetensi berbahasa Inggris dengan score IELTS minimal 7.0 untuk semua bidang (speaking, listening, reading, writing). 4. Aturan *Point Based System*. Australia juga menggunakan sistem poin dalam permohonan PR visa. Poin ini akan didapatkan pemohon dengan melakukan studi ataupun bekerja di Australia. Jumlah poin yang di dapat tergantung dari jenjang pendidikan, jenis pekerjaan dan juga lama studi ataupun bekerja. Semakin banyak jumlah poin yang didapat, kesempatan untuk mendapatkan *Permanent Residency* pun akan menjadi semakin besar. 5. Ketentuan Medis dan Karakter. Dalam pengajuan permohonan PR visa, pemohon juga diwajibkan untuk mengikuti beberapa tes, yakni di antaranya adalah tes medis dan karakter. Hal ini dilakukan agar penerima PR visa nantinya memanglah orang yang memiliki kesehatan dan juga karakter yang baik pula.

Hal ini ditunjukkan oleh agar para imigran yang masuk ke negaranya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri pekerjaan yang sedang dibutuhkan oleh. Seleksinya terhadap imigran yang akan memasuki wilayah Inggris akan dilakukan dan harus melewati berbagai tahap uji jasmani maupun psikis (Aya, 2016). Sama seperti di Australia, para imigran yg akan bekerja di Inggris harus memiliki visa kerja dengan berbagai kriteria seperti penilaian pengalaman kerja, kualifikasi kapabilitas individu, dan seleksi usia. Sedangkan bagi imigran yang bertujuan untuk menetap secara permanen, wajib memiliki visa tinggal permanen serta harus lulus

beberapa persyaratan. Diantaranya adalah tahap uji kesehatan dan komunikasi. Pada kategori kesehatan, Inggris melakukan seleksi dengan melihat kondisi fisik beserta riwayat kesehatan yang dimiliki oleh para calon imigran. Melalui kategori kesehatan tersebut Inggris melihat apakah calon imigran memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan kriteria pekerjaan yang tersedia serta apakah calon imigran tersebut memiliki riwayat penyakit yang utamanya memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan apakah calon imigran tersebut pernah berpergian ke negara-negara yang pernah mengalami wabah penyakit menular seperti salah satunya virus ebola. Dalam kategori komunikasi imigran wajib mampu berbahasa Inggris. Inggris pun telah menentukan standarisasi kemampuan berbahasa yang salah satunya adalah 60 test IELTS dengan nilai minimum 7. Hal ini dimaksudkan agar calon imigran ketika diterima dan langsung terjun ke lapangan pekerjaan dan dapat mengerjakan pekerjaan secara optimal tanpa menghambat faktor komunikasi (MbaCrystalBall, 2019)

Jadi berdasarkan paparan di atas Inggris akan mengadaptasi kebijakan imigrasi Australia, khususnya Skill Assisment yang mana Imigran harus mempunyai kemampuan khusus bila ingin memasuki wilayah Inggris. Sehingga para imigran tersebut dapat langsung terjun ke lapangan pekerjaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Tidak seperti sebelumnya saat Inggris masih bergabung dengan Uni Eropa, Inggris harus mengikuti peraturan Uni Eropa yang membuat para imigran dengan bebas memasuki Inggris tanpa memiliki kemampuan khusus yang memberikan dampak negatif seperti Imigran melakukan tindakan kriminalitas (VOA, 2016). Keputusan brexit ini sendiri masih terus berdinamika hingga saat ini. Walaupun keputusan brexit ini telah disetujui oleh rakyat Inggris, namun pengajuan diri untuk keluar dari organisasi Unii Eropaa hingga saat ini

masih harus melalui sejumlah proses yang panjang. Berdasarkan pasal 50 Traktat Lisbon disebutkan bahwa bila suatu negara ingin mengundurkan diri dari keanggotaannya, maka wajib bagi negara tersebut untuk memberikan notifikasi kepada Dewan Uni Eropa. Dewan Eropa kemudian berunding dengan mempertimbangkan kerangka kerja mengenai kerja sama hubungan masa depan Inggris dengan Uni Eropa. Unii Eropaa sendiri masih terus mengadakan negosiasi terhadap Inggris terkait dengan keputusan brexit tersebut. 61 isu brexit ini bahkan masih menjadi pergolakan di dalam negeri itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyak dari Parlemen Inggris tidak menyetujui hasil dari keputusan brexit yang diajukan oleh Theresa May tersebut. Hasil referendum bahwa Inggris keluar dari Unii Eropaa atau Brexit bahkan telah ditolak tiga kali di parlemen Inggris itu sendiri. Brexit yang awalnya dijadwalkan akan keluar dari Unii Eropaa pada 29 Maret 2019 namun ditunda hingga 31 Oktober 2019. Selama proses brexit ini berlangsung akhirnya Theresa May pun memutuskan untuk mengundurkan diri pada 07 Juni 2019. Alasan pengunduran dirinya tersebut dikarenakan ia merasa gagal dalam melaksanakan menyelesaikan tugasnya untuk mewujudkan brexit. Akhirnya Theresa May pun digantikan kedudukannya oleh Perdana Menteri Boris Johnson yang mulai menjabat sejak 23 Juli 2019. Selanjutnya Boris Johnson yang akan melanjutkan proses Brexit yang rencananya akan diputuskan pada 31 Januari 2020 (BBC, 2019).

5. KESIMPULAN

Permasalahan mengenai imigran dapat dikatakan sebagai suatu persoalan klasik bagi Inggris. Dapat dikatakan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak adanya kontrol penuh bagi Inggris terkait arus masuk imigran ke dalam wilayah negaranya. Ketidakadaan kontrol ini kemudian menjadi salah

satu akar dari permasalahan imigran yang dialami oleh Inggris. Terkait hal ini Inggris kemudian mulai melakukan beberapa identifikasi terkait solusi dari permasalahan tersebut. Mereka kemudian menganggap bahwa terdapat suatu keterkaitan antara keanggotaan mereka di dalam Uni Eropa terkait tidak adanya kontrol bagi Inggris terkait penerimaan imigran baik dari Uni Eropa maupun non- Uni Eropa. Keterkaitan antara keanggotaan Inggris di dalam Uni Eropa terhadap permasalahan ini salah satunya dapat dilihat dari adanya Open Door Immigration Policy yang mana mewajibkan negara Uni Eropa untuk berbagi tanggung jawab terkait penerimaan imigran, khususnya dari negara non- Uni Eropa. Identifikasi masalah yang dilakukan Inggris terkait hal ini bersamaan dengan suatu pergerakan British Exit atau Brexit. Brexit pada dasarnya adalah untuk mendorong diadakannya referendum terkait status keberadaan Inggris di dalam Uni Eropa. Persoalan imigran kemudian menjadi salah satu instrumen yang didengungkan oleh para pendukung kampanye Brexit sebagai salah satu alasan untuk mendorong keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pada prosesnya Inggris kemudian mengadakan referendum yang menghasilkan bahwa mayoritas masyarakat Inggris memilih agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Keputusan untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa tentu berdampak pada banyak aspek. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa tentu berpengaruh pada independensi Inggris terkait perumusan suatu kebijakan. Hal ini berlaku pula pada kebijakan mereka terhadap akses bagi keluar-masuknya warga negara asing khususnya para imigran di dalam wilayah mereka. Meskipun keluarnya Inggris dari Uni Eropa masih dalam tahap proses, arah kebijakan Inggris terkait hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan yg dikeluarkan oleh pejabat negara dari Inggris sendiri. Seperti halnya Perdana Menteri Inggris pada masa diadakannya referendum Brexit, Theresa May menyatakan bahwa Inggris akan

mengadopsi kebijakan Australia dalam melakukan seleksi terkait masuknya para imigran non-Uni Eropa untuk mendapat izin tinggal dan bekerja dengan menentukan beberapa kriteria yang ada. Terkait dengan imigran dari sesama Uni Eropa, Inggris akan memberikan batas izin tinggal bagi mereka agar dapat melakukan pengurusan terkait izin tinggal serta bekerja di Inggris sendiri. Saran dari penelitian yang berjudul "Dampak Referendum Brexit terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris" ditujukan kepada peneliti selanjutnya yg ingin mengangkat penelitian dengan tema yang sama. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya mengambil lokus yang dapat mencakup keputusan akhir mengenai proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Selain itu, pengumpulan data yang lebih spesifik serta bersifat terbaru sangat diperlukan mengingat proses dari Brexit sendiri masih menuai pro dan kontra sehingga akan mempengaruhi alur dari penelitian itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Armandhanu, D. (2016). Imigran paling Menderita Setelah Inggris keluar dari UE. Retrieved from CNN:
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624145412-134-140695/imigran-paling-menderita-jika-inggris-keluar-dari-uni-eropa/>
- BBC. (2015). Australia paid migrant smugglers to turn back. Retrieved from BBC:
<https://www.bbc.com/news/world-australia-33110575>
- BBC. (2016). UK Votes to Leave the EU. Retrieved from BBC:
https://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results
- Christiastuti, N. (2016, July). *Detik News*. Retrieved from Detik News:

<https://news.detik.com/internasional/3253150/jadi-menteri-brexit-ini-strategi-david-davis-untuk-inggris>

CNN. (2018). *Brexit, Inggris Akan Hentikan Akses Khusus Pekerja Uni Eropa*. Retrieved from CNN: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181002080053-134-334851/brexit-inggris-akan-hentikan-akses-khusus-pekerja-uni-eropa>

Dewi, A. U. & Sudagung, A. D. (2017) 'Indonesia's Migrant Domestic Workers within ASEAN Community Framework', *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(1), p. 20. doi: 10.24198/intermestic.v2n1.3

Government, A. (2019). *Permanent Resident*. Retrieved from Australia Government Department of Home Affairs: <https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/permanent-resident>

Haddou, A. (2015). Morocco and Their Decision to Withdraw from The African Union.

Hamilton, M. (2016, July 31). Hundreds of Syrians in UK arrested over string of offences including rape and child abuse. Retrieved from The Sun: <https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundreds-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse/>

Jonathan Wadsworth, S. D. (2016). Brexit and the Impact of Immigration on the UK. 2-4.

Kompas. (2013, December 12). *Inggris Pusing dengan Rumah Rumah Imigran Gelap*. Retrieved from Kompas: <https://properti.kompas.com/read/2013/12/19/1445031/Inggris.Pusing.dengan.Rumah-rumah.Gelap.Imigran>

MbaCrystalBall. (2019). *IELTS for Immigration UK*. UK.

News, B. (2016, April 09). *Paris and Brussels bombers' links uncovered*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-35879401>

Sari, A. P. (2016, June 24). *Dampak Brexit bagi Uni Eropa , dari Ekonomi hingga Imigrasi*. Retrieved from CNN: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859-134-140703/dampak-brexit-bagi-uni-eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi>

Strachan, A. L. (2014). *Conflict Analysis Of Morocco*.

UK, T. I. (2016, June 24). *EU Referendum result in full : Brexit campaign secures victory by 4 points*. Retrieved from The Independent UK: <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-referendum-final-result-leave-campaign-secures-official-lead-a7099296.html>

White, N. (2016). *Migration Statistic Quarterly Report: February 2016*. Retrieved from Office for National Statistic: <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalimmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february>

VOA, (2018) Pasca Brexit, Inggris Prioritaskan Tenaga Kerja Ahli, Retrieve from <https://www.voaindonesia.com/a/pasca-brexit-inggris-prioritaskan-tenaga-kerja-ahli/4595824.html>

Zoubir, Y. H. (1996). *The Western Sahara Conflict: A Case Study In Failure Of Prenegotiation and Prolongation Of Conflict Vol 26*.

